



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KETUT GEDE MUDIARTA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 741859

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.786.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m²/120 m² di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/65 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah Seluas 1500 m² di KAB / KOTA BULELENG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 210 m² di KAB / KOTA BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 52.500.000
5. Tanah Seluas 410 m² di KAB / KOTA BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.070.000
6. Tanah Seluas 3180 m² di KAB / KOTA BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 159.000.000
7. Tanah Seluas 3190 m² di KAB / KOTA BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.130.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 324.000.000

1. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 190.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.364.508.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.665.208.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.665.208.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.